

KOORDINASI PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

(Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)

Oleh

Bill A. Lumi¹

Novie R. Pioh²

Alfon Kimbal³

Abstrak

Pembangunan pada dasarnya sebagai upaya yang terencana dan terprogram secara terus menerus oleh satu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dewasa ini bangsa Indonesia sedang melakukan pekerjaan yang sangat besar yaitu mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Agar proses pembangunan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan, maka salah satu aspek yang diperhatikan adalah koordinasi dari aparat pelaksana pembangunan.

Koordinasi salah satu cara untuk mempersatukan usaha dari setiap penanggung jawab pelaksana pembangunan atau unit kerja yang ada di suatu daerah guna mempermudah proses pembangunan terutama pembangunan yang sesuai dengan tuntutan otonomi daerah mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dari pelaksana pembangunan pada suatu daerah dapat tercapai.

Mekanisme pengkoordinasian dalam pelaksanaan pembangunan untuk tetap mengarahkan aktivitasnya kearah pencapaian tujuan pembangunan tersebut dan mengurangi ketidak efisienan serta konflik yang merusak. Pengkoordinasian dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Dalam pembangunan dibutuhkan koordinasi yang baik agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Saling koordinasi yang baik dalam pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat sehingga kedua belah pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Kata Kunci : Koordinasi, Pemerintah Desa, Pembangunan

¹ Mahasiswa Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

² Tenaga Pendidik Pada Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

³ Tenaga Pendidik Pada Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

PENDAHULUAN

Pembangunan pada dasarnya sebagai upaya yang terencana dan terprogram secara terus menerus oleh satu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dewasa ini bangsa Indonesia sedang melakukan pekerjaan yang sangat besar mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan-perencanaan dan pelaksanaan perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan umat manusia sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri.

Pembangunan ini merupakan langkah menuju masyarakat baik itu dari segi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan maka dari itu pemerintah dituntut agar lebih memperhatikan hal-hal ini salah satu pentingnya pembangunan ini ialah pembangunan fisik dimana pembangunan fisik ini merupakan salah satu penunjang keberhasilan perekonomian masyarakat seperti pembangunan jalan dan proses pelayanan bagi masyarakat yakni kantor desa ini sangat diperlukan untuk kelancaran proses pelayanan administrasi bagi masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Agar proses pembangunan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan, maka salah satu aspek yang diperhatikan adalah koordinasi dari aparat pelaksana pembangunan.

Koordinasi salah satu cara untuk mempersatukan usaha dari setiap penanggung jawab pelaksana pembangunan atau unit kerja yang ada di suatu daerah guna mempermudah proses pembangunan terutama pembangunan yang

sesuai dengan tuntutan otonomi daerah mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dari pelaksana pembangunan pada suatu daerah dapat tercapai. Koordinasi dilakukan untuk menyelaraskan berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan mulai dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas, sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan memberi instruksi/perintah, mengadakan pertemuan dan memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat. Penetapan mekanisme dalam suatu kegiatan sangat penting untuk mengkoordinasi pekerjaan atau mengorganisasi satu kesatuan yang harmonis.

Mekanisme pengkoordinasian dalam pelaksanaan pembangunan untuk tetap mengarahkan aktivitasnya kearah pencapaian tujuan pembangunan tersebut dan mengurangi ketidak efisienan serta konflik yang merusak. Pengkoordinasian dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksanaan pembangunan untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai suatu tujuan. Tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan hendaknya mendapat perhatian yang lebih dari segenap unsur operasional penyelenggara

pembangunan. Oleh karena itu kesempurnaan sistem koordinasi diharapkan mampu menjadikan tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan menjadi tinggi. Unsur yang menunjang efektivitas pelaksanaan pembangunan dari sudut pencapaian tujuan bukan hanya mempertimbangkan sasaran, tetapi juga mekanismenya mempertahankan diri dan manajemen sasaran.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Koordinasi Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Singsingon Barat Kec. Passi Timur Kab. Bolaang Mongondow.? Untuk mengkaji dan mengetahui koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Singsingon Barat Kec. Passi Timur Kab. Bolaang Mongondow.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *coordination, co dan ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi dikaitkan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyetarakan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang sesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Leonard D. White dalam H. Inu Kencana Syafie (2011:187), Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoprasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian

dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

Dari definisi-definisi koordinasi di atas, dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah suatu usaha, kegiatan-kegiatan, kerjasama dan kesepakatan bersama secara teratur serasi, selaras, seimbang dan serempak dalam mencapai suatu tujuan tertentu serta mencegah terjadinya konflik, kekacauan, percekocokan, kekosongan pekerjaan dan sebagainya dalam suatu organisasi.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka penulis cenderung menggunakan pendekatan dengan aspek-aspek koordinasi yang di kemukakan oleh Handayani (1989:80) sebagai rujukan dalam menjelaskan tentang koordinasi pemerintah desa dalam pembangunan. Adapun aspek-aspek yang mencakup:

1. Komunikasi
2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi
3. Kompetensi Partisipan
4. Kontinuitas Perencanaan

Konsep Pemerintah Desa

Menurut Inu Kencana (2009:3-4) dalam bukunya yang berjudul kepemimpinan pemerintahan di Indonesia, secara etimologi pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang mempunyai awalan “pe” yaitu “pemerintah” dan mendapat akhiran “an” yang artinya “pemerintahan”, dalam kata dasar perintah menurut Inu Kencana paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut ;

1. Ada dua pihak yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat.
2. Pihak memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk

mengatur dan mengurus rakyatnya.

3. Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
4. Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik baik secara vertical maupun horizontal.

Dalam mengelola pemerintahan secara baik dan benar, pemerintah hendaknya jangan hanya sebagai penjaga malam yang mementingkan ketertiban tetapi juga jangan lupa pada ketentraman dan kesejahteraan jadi jangan mampu berkuasa tetapi juga mampu untuk melayani. Oleh karena itu disebut sebagai pemerintah yang baik dan benar atau dengan kata lain *good governance* dan *clean governance*.

Selanjutnya menurut R. Mac Iver dalam Inu Kencana (2009:6), Pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan yang bagaimana manusia itu bisa diperintah. Samuel Edward Finer dalam Inu Kencana (2009:6), juga menambahkan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus (*proses*), wilayah Negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*), dan cara, metode serta sistem (*manner, method and system*) dari pemerintah terhadap rakyatnya.

Konsep Pembangunan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014. Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita

memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan, Siagian (2008:45) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Ginanjar Moejiarto (2007:32) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikkan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, menurut Husaini Usman (2009:78), metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingka laku manusia dalam situasi tertentu menurut prespektif peneliti sendiri. Yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang koordinasi pemerintahh desa dalam pembangunan di Desa Sinsingon kec. Passi Timur Kab. Bolaang Mongondow. Adapun bentuk penelitiannya adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait fokus penelitian sehingga dapat menemukan ruang lingkup tertentu. Data didapatkan dengan penelitian langsung ke lokasi penelitian.

Fokus dalam penelitian ini adalah koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sinsingon Barat Kec. Passi timur, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Handyaningrat dengan melihat aspek-aspek :

1. Komunikasi
2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi
3. Kompetensi Partisipan
4. Kontinuitas Perencanaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan Pembangunan Nasional akan terwujud apabila didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah termasuk di tingkat desa dan kelurahan. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan menurut UU No. 6 Tahun 2014 diarahkan mampu melayani dan mengayomi masyarakat, mampu menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dalam hal ini pemerintah harus mampu mengkoordinasikan sebagai unit dalam pemerintahan agar dapat mendayagunakan fungsi mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang nyata bagi proses pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan di desa merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di desa atau tingkat kelurahan peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan.

Komunikasi pemerintah dalam hal ini kepala desa untuk dapat menyampaikan berbagai informasi tentang kebijakan pembangunan desa yang akan di laksanakan di desa Sinsingon Barat dan juga kepada masyarakat setempat agar masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan. Peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah desa sinsingon barat sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan.

Komunikasi Pemerintah adalah penyampaian, ide program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara dalam hal ini pemerintah dapat di asumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan. Namun dalam suasana tertentu bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang di inginkan masyarakat. Komunikasi yang dibangun oleh aparat/pemerintah desa adalah komunikasi yang melahirkan konsep atau gagasan dalam pembangunan desa. Dengan adanya komunikasi antara aparat/pemerintah desa dan masyarakat maka akan menunjang proses implementasi dari pembangunan desa khususnya di desa Sinsingon Barat.

Pentingnya Koordinasi Pemerintah dan Masyarakat

Koordinasi pemerintah merupakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang harus ditunjukan kearah tujuan yang hendak dicapai yaitu yang telah ditetapkan menjadi tujuan Negara baik untuk tingkat pusat ataupun tingkat daerah sampai ke tingkat desa, guna menuju kepada sasaran dan tujuan itu gerak kegiatan harus ada pada pengendalian sebagai alat untuk menjamin langsungnya kegiatan.

Mengenai koordinasi yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur desa yang mengarah pada pembangunan fisik di desa Sinsingon Barat perlu mendapat perhatian yang lebih, karena dari upaya peningkatan pembangunan infrastuktur dapat memberikan dampak positif bagi desa untuk lebih berkembang dan juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan upaya dan

usaha pemerintah dalam peningkatan mutu kualitas pelayanan kepada masyarakat Indonesia dalam pembangunan nasional dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan memperhatikan konsep pengembangan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif yang berasal dari kebutuhan masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu untuk menuju cita-cita ideal dari beberapa tujuan yang ingin dicapai diantaranya, pemerataan pembangunan, menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Kompetensi Masyarakat dalam Pembangunan

Dari begitu banyaknya permasalahan dalam pembangunan desa maka diperlakukan suatu strategi untuk mengatasinya, strategi dasar yang dilakukan dalam pembuatan kebijakan adalah pembangunan yang diarahkan seminimal mungkin terjadinya kesenjangan antara lain dengan mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Selain strategi dasar tersebut maka perlu adanya strategi pendukung dalam mengatasi masalah pembangunan desa yaitu dengan pembangunan infrastruktur dan infrastruktur lainnya serta pelibatan masyarakat dalam pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih makmur dan sejahteraan bagi masyarakat, dalam upaya pembangunan partisipasi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena pembangunan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan dengan adanya peran partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan hasil dari pembangunan sesuai dengan apa yang

diharapkan dan dibutuhkan oleh daerah tersebut. Partisipasi masyarakat sebagai strategi pendukung dalam mengatasi permasalahan pembangunan desa sangatlah penting peranannya, seperti adanya koordinasi, komunikasi yang baik serta kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan.

Kontinuitas Perencanaan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pembangunan merupakan serangkaian usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana serta berkelanjutan oleh suatu bangsa dengan harapan membawa perubahan dan pertumbuhan guna mempercepat modernisasi kehidupan bangsa untuk pencapaian tujuan akhir bangsa tersebut. Aspek-aspek pembangunan telah mengalami perubahan sejak komunikasi pembangunan mulai dikenal di Indonesia pada awal 1970-an baik dalam organisasi strategi penanggulangan kemiskinan maupun penggunaan media komunikasi.

Berdasarkan prinsip tahap awal, proses koordinasi harus dilakukan pada tahap awal proses perencanaan. Koordinasi harus dimulai sejak proses perencanaan sehingga dapat menghasilkan perencanaan dan implementasi yang baik. Jika koordinasi selalu dilakukan di awal maka semua fungsi manajemen yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* dapat terlaksana dengan baik. Selain itu dengan proses koordinasi yang baik, tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih mudah dan cepat.

Berdasarkan prinsip kontinuitas atau kesinambungan, koordinasi dalam perencanaan merupakan sebuah proses yang berkelanjutan atau

berkesinambungan, kontinuitas perencanaan dimulai sejak prinsip timbal balik menyatakan bahwa semua faktor dalam organisasi saling bergantung dan berhubungan. Setiap keputusan dalam tindakan seseorang di dalam organisasi akan mempengaruhi situasi keseluruhan organisasi. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan atau melakukan tindakan harus mempertimbangkan efek yang muncul pada orang lain atau departemen lain apabila keputusan atau tindakan tersebut diterapkan. Dengan diterapkannya prinsip ini diharapkan seorang atau anggota lainnya mengambil keputusan atau tindakan sepihak, sehingga koordinasi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan berkesinambungannya pembangunan yang direncanakan berjalan dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Komunikasi antara pemerintah desa serta masyarakat desa Singsingon Barat sudah terselenggara dengan baik, komunikasi disini lebih mengarah kepada penyampaian-penyampaian informasi kepada masyarakat serta masukan-masukan langsung dari masyarakat tentang pembangunan.
2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pembangunan pemerintah desa Singsingon Barat selalu berkoordinasi terlebih dahulu bersama aparat desa dan badan permusyawaratan desa, walaupun masih ada masyarakat yang tidak paham tentang koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa akan tetapi, koordinasi pemerintah desa Singsingon Barat sudah baik, dimana

dalam setiap pelaksanaan selalu melalui perencanaan yang terstruktur dan lewat komunikasi yang baik.

3. Dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi dari masyarakat sangat antusias. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah cukup aktif baik dalam partisipasi langsung maupun tidak langsung.
4. Perencanaan pembangunan selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu lewat musrembangdes (Desa), sehingga keberhasilan pembangunan selalu berkelanjutan dengan arah tujuan yang diinginkan bersama.

Saran

1. Mempertahankan dan meningkatkan komunikasi yang sudah terjalin antara masyarakat dan pemerintah desa, agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai keinginan bersama.
2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan alangkah baiknya koordinasi yang sudah terjalin dipertahankan, akan tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah desa lebih transparan kepada masyarakat tentang koordinasi dari pada pemerintah desa sinsingon barat.
3. Mempertahankan setiap keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi agar dalam pelaksanaannya selalu melibatkan masyarakat.
4. Perencanaan lebih transparan agar masyarakat lebih tau tentang apa yang direncanakan oleh pemerintah khususnya dalam pembangunan fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Madekhan, 2007. *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*. Malang. Averroes Press.
- Afifuddin, 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Cetakan kedua. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Awaluddin Djamin dalam Hasibuan, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung. Bumi Askara.
- G. R. Terry dalam Inu Kencana Syafie, 2011. *Etika Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Gianjar, Moejiarto, 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Handayaniingrat, 1989. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Cetakan Keenam. Jakarta. PT Gunung Agung.
- Husaini Usman, 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Ed.2. Cetakan ketiga. Jakarta. Bumi Aksara.
- Inu Kencana, 2009. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Cetakan ketiga. Bandung. PT Refika Aditama.
- Leonard D. White dalam Siagian, Sondang P. 2008. *Adminitrasi Pembangunan*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Malayu S.P Hasibuan, 2011. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi. Bandung. Bumi Aksara.
- R. Mac Iver dalam Inu Kencana, 2009. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Cetakan ketiga. Bandung. PT Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Adminitrasi Pembangunan*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Sumendar dalam Inu Kencana, 2009. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Cetakan ketiga. Bandung. PT Refika Aditama

Syuroh, 2009. *Good Governance dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Pustaka Felicha

Tarigan Robinsson. 2009. *Perencanaan Pembangunan Wialayah*, Edisi revisi. Jakarta. Penerbit PT Bumi Askara

Sumber Lain :

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri dalam negeri No 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D)